

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai tingkat efektifitas perusahaan dalam membayar pajaknya atau *ETR* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut adalah uraian mengenai beberapa peneliti yang membahas tentang *ETR*.

Zeng (2011:271) yang meneliti tentang konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pemerintah, dan *ETR* pada perusahaan publik di China dengan menggunakan 758 sampel perusahaan di China pada tahun 1998-2008. Dalam penelitian ini ditemukan adanya pengaruh konsentrasi kepemilikan perusahaan dengan praktik pelaporan pajak perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah konsentrasi kepemilikan pemerintah. Perusahaan yang pemegang saham terbesarnya milik pribadi memiliki nilai *ETR* yang rendah. Sedangkan perusahaan yang pemegang saham terbesarnya milik pemerintah/negara, memiliki nilai *ETR* yang lebih tinggi.

Penelitian lain dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2012:60). Dalam penelitiannya Rodriguez dan Arias (2012:60) membahas tentang analisis komparatif dari beban pajak perusahaan yang di China dan Amerika. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, struktur modal, tingkat persediaan, aset campuran, profitabilitas dan lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang ada di China cenderung mempunyai *ETR* yang lebih rendah dari pada perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Hasil ini dikarenakan kebijakan pajak yang diadopsi berbeda antara di China dan Amerika Serikat.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zeng (2011:271) dan Rodriguez dan Arias (2012:60), Sabli dan Noor (2012:25) dalam artikelnya menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax planning*. Sabli dan Noor (2012:23) menemukan bahwa mekanisme *corporate governance*

internal dan eksternal tidak mempengaruhi *ETR* perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportion of independent directors* dan *institutional investors*, sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah *firm size*, *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity ratio*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mempunyai ketergantungan yang tinggi pada bantuan konsultan pajak daripada manajemen puncak dalam kegiatan perencanaan kegiatan.

Danis Ardyansah (2014:1) melakukan penelitian pada 148 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010-2012 dengan menggunakan variabel independen yaitu *size*, *leverage*, *profitability*, *intensity ratio*, dan komisaris independen. Sedangkan variabel dependennya berupa *ETR*. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 75 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size* dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *ETR*. Sedangkan *leverage*, *profitability* dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ETR*.

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Imelia (2015:1) dengan menggunakan variabel independen yaitu, ukuran perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen. Sedangkan variabel dependennya adalah *ETR*. Dari penelitian ini menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Danis Ardyansah (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *ETR*, sedangkan *leverage*, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *ETR*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septi Imelia (2015), Khusniyah dan Nur Diana (2017:13) melakukan penelitian dengan variabel independen *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio*, dan *activity ratio*. Sedangkan variabel dependennya berupa *ETR*. Hasil dari penelitian ini adalah *size* berpengaruh signifikan terhadap *ETR*, *leverage* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *ETR*, *profitability* tidak berpengaruh signifikan positif

terhadap *ETR*, *capital intensity ratio* berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap *ETR*, *activity ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *ETR*.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Meta (2016:1) dengan variabel independen *size*, *leverage*, *profitability*, dan *capital intensity ratio*. Sedangkan variabel dependennya yaitu *ETR*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *size*, *leverage*, *capital intensity ratio* berpengaruh signifikan terhadap *ETR*, sedangkan *profitability* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ETR*.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Agensi**

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Jensen dan Meckling (1976:305) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa prinsipal yang menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Dalam pendelegasian wewenang pemilik (prinsipal) kepada manajer (agen), manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik.

Manajer berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup signifikan, kemudian agen melaporkan kepada pemilik perusahaan (prinsipal) tentang keadaan perusahaan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Karena memiliki tanggung jawab yang berat, manajer menuntut pemilik perusahaan (prinsipal) untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan manajer. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen (agen) dengan pemilik (prinsipal) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Melinda dan Nur, 2013:2). Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi (*agency cost*) yaitu biaya yang

timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan (Masri dan Martani, 2012)

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Ardyansah 2014:2).

### **2.2.2 Effective Tax Rate**

Citra Lestari Putri dan Maya Febrianty Lautania (2016:104) menyebutkan bahwa *ETR* merupakan ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. *ETR* dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif.

*ETR* didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan total dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (PWC, 2011). Sedangkan Dittmer (2011:40) mendefinisikan *ETR* sebagai rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu. *ETR* adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Dari definisi tersebut *ETR* mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah presentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh.

*Price Waterhouse Coopers (PWC)* merumuskan tarif pajak efektif sebagai total pajak penghasilan terutang dibagi dengan penghasilan sebelum pajak. Total pajak penghasilan terutang merupakan beban pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan (Handayani dan Arfan, 2014:12). Dari definisi tersebut *ETR* mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar presentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Dari tarif pajak

efektif ini perusahaan bisa melihat berapa pajak yang sebenarnya dibayar apakah lebih besar atau lebih kecil dari tarif yang ditetapkan berdasarkan laba komersial sebelum pajak perusahaan tersebut. Tarif pajak efektif perusahaan merupakan ukuran penting dari beban pajak bagi para pembuat kebijakan untuk jenis usaha tertentu dan dalam pemberian insentif kepada wajib pajak. Sedangkan di pihak pemerintah tarif pajak efektif ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat peraturan perpajakan tentang insentif yang akan diberikan kepada wajib pajak tertentu serta dalam penetapan tarif pajak yang berlaku.

Beberapa alasan mendasar terkait dengan penetapan *ETR* perusahaan. Alasan pertama adalah adanya pengaruh politik yang terjadi dalam proses perpajakan. Pengaruh perubahan politik terkadang dapat menyebabkan adanya intervensi tergantung dengan bagaimana pihak-pihak yang berkuasa dan yang berkepentingan. Tidak transparasinya proses penetapan tarif pajak yang dilakukan pemerintah menyebabkan adanya kemungkinan intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Alasan kedua adalah kandungan informasi laporan pajak perusahaan yang ditimbulkan oleh para investor. Dengan laporan pajak maka para investor dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### **2.2.3 Size (Ukuran Perusahaan)**

Ukuran perusahaan merupakan indikator untuk mengukur tahap kedewasaan suatu perusahaan. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil (Darmadi dan Zulaikha, 2013:2).

Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Richardson dan Lanis (2007:699) ada dua pandangan yang saling bersaing tentang hubungan antara *ETR* dan ukuran perusahaan: *the political cost theory* dan *political power theory*. *The political cost theory* mempunyai visibilitas yang tinggi, hal ini menyebabkan perusahaan akan menjadi sorotan pemerintah dan menjadi korban regulasi dari kebijakan pemerintah. Sedangkan *the political power theory* menjelaskan hubungan antara perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan *tax planning* untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ardiansyah (2014:1), Septi Imalia (2015:1), Khusniyah dan Nur Diana (2017:13), dan Meta (2016:1), total aset menjadi tolak ukur atas besar atau kecilnya perusahaan. Hal itu akhirnya mempengaruhi peneliti untuk menggunakan total aset sebagai alat ukur besarnya perusahaan. Karena total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural ( $\ln$ ).

#### **2.2.4 Leverage**

*Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari hutang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Meta 2016:3). Tingkat utang adalah besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang. Dalam hal ini utang berbanding terbalik dengan laba sehingga semakin besar maka laba akan semakin kecil dengan penambahan beban bunga. Terkait dengan pajak, semakin besar laba yang diperoleh maka akan semakin besar pula kewajiban pajaknya (Tiearya, 2012:3).

*Leverage* menjelaskan hubungan antara penggunaan dana perusahaan yang diperoleh dari utang. Penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu bunga. Biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, sehingga penggunaan utang sebagai pembiayaan operasional perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai

*ETR* yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor et al, 2010:14).

Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung *ETR* perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Noor *et al* (2010:14) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *ETR* yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

Pada penelitian terdahulu, para penulis menggunakan *Debt to Equity Ratio* yang menggambarkan komposisi/struktur modal perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menggunakan rasio keuangan yang sama, yaitu *Debt to Equity Ratio*.

### **2.2.5 Profitability**

Atarwaman (2011:69) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Ghazali dan Chariri dalam Atarmawan (2011:68) menjelaskan bahwa laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan biaya. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan apakah mendapatkan laba atau rugi dari kegiatan usaha perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013:2).

Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan (Atarwaman, 2011:67). Perusahaan yang menerima penghasilan atau mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1

menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007:701).

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak.

Adapun tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut (Kasmir, 2008:25), yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
7. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Dan manfaat lainnya.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan melihat *Return On Assets (ROA)*. Syamsudin (2004:35) mengatakan bahwa *Return On Assets (ROA)* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan.

#### **2.2.6 Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal.

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan *corporate governance* karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor. Untuk mendorong implementasi *corporate governance*, dibentuk sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia (Surya dan Yustiavandana, 2006:133)

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa komisaris independen:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten pada Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Sedangkan berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor Kep-305/BEJ/07-2004 perusahaan harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tercatat.

Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama yaitu meliputi (Surya dan Yustiavandana, 2006:138):

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*).

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset dan memanipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham (*fairness*).
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan melakukan perubahan jika diperlukan.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan jelas.

Proporsi komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin erat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku ( Danis Ardyansah, 2014:20).

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan cara penghitungan proporsi komisaris independen yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Danis Ardyansah (2014:20). Proporsi dewan komisaris independen, yaitu jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh *Size* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)***

*Size* atau ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan

dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak.

Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan *ETR* perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012:78). Aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, perusahaan yang besar cenderung mempunyai aset yang besar. Aset akan mengalami penyusutan setiap tahunnya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga menurunkan beban pajak yang dibayarkan. Perusahaan yang besar mempunyai manajemen yang baik biasanya mempunyai konflik perbedaan kepentingan yang lebih rendah antara pihak pemegang saham (prinsipal) dan pihak manajemen (agen). Derashid dan Zhang (2003:55) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil, ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Richardson dan Lanis (2007:697) menyebutkan bahwa, semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *ETR* yang dimilikinya. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Danis Ardyansah (2014:1), Khusniyah dan Nur Diana (2017:1), dan Meta (2016:1), diperoleh hasil bahwa *size* berpengaruh signifikan terhadap *ETR*. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$ : *Size* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

### **2.3.2 Pengaruh Leverage terhadap *Effective Tax Rate (ETR)***

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu konflik antar prinsipal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan

perusahaan, sehingga pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan utang.

Utang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga utang. Menurut Darmadi dan Zulaikha (2013:4), jika biaya bunga pada utang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan utang untuk pendanaan guna mendapatkan benefit berupa biaya bunga pada utang. Biaya bunga pada utang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Derashid dan Zhang (2003:45) melakukan penelitian dengan hasil bahwa utang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa utang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan.

Pemilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Masri dan Martani, 2012:13). Modigliani dan Miller dalam Masri dan Martani (2012:13) menjelaskan bahwa biaya bunga merupakan faktor pengurangan pajak penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak. Di sisi lain, penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu bunga. Biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, sehingga penggunaan utang sebagai pembiayaan operasional perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *ETR* yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor *et al*, 2010:12).

Berdasarkan *literature* sebelumnya Meta (2016:1) dan Septi Imelia (2015:1) menemukan hasil yang signifikan terkait dengan pengaruh signifikan *leverage* terhadap *ETR*. Sedangkan Danis Ardyansah (2014:1), dan Khusniyah dan Nur Diana (2017:15) memperoleh hasil *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ETR*. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

$H_2$ : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

### 2.3.3 Pengaruh *Profitability* terhadap *Effective Tax Rate*

*Profitability* merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012:76) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan *ETR* bersifat langsung dan signifikan. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki *tax burden* yang tinggi.

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai agen dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Manajer sebagai agen dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al* (2010:10) menemukan hubungan negatif antara profitabilitas dengan tarif pajak efektif. Hubungan negatif ini mengidentifikasi perusahaan yang semakin efisien dan mempunyai profit yang tinggi membayar beban pajak yang rendah. Alasan yang memungkinkan adalah bahwa profitabilitas perusahaan dikelola untuk menurunkan tarif pajak efektifnya.

Dalam penelitian terdahulu, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *ETR*. Maka peneliti dalam penelitian ini membuat hipotesis berupa:

H<sub>3</sub>: *Profitability* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

### **2.3.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate (ETR)***

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Persyaratan mengenai komisaris independen yang harus ada dalam jajaran komisaris menunjukkan bahwa peranan dari komisaris independen sangat penting bagi perusahaan.

Menurut Meilinda dan Nur (2013:3) semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang luas terhadap stakeholders-nya (Meilinda dan Nur, 2013:5).

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Surya dan Yustiavanda (2006:135) bahwa komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sabli dan Noor (2012:30) menyebutkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen melakukan pengarahan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Diharapkan semakin banyak jumlah komisaris independen akan menurunkan tarif pajak efektif perusahaan.

Hasi dari penelitian yang dilakukan oleh Danis Ardyansah (2014:1), Septi Imelia (2015:1) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *ETR*. Dalam hal ini, penulis menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

## 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang disebut variabel Y, dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate (ETR)*. Variabel berikutnya adalah variabel independen atau variabel X, dalam penelitian ini terdapat empat variabel, yaitu *Size*, *Leverage*, *Profitability*, Komisaris Independen. Untuk menjelaskan hubungan keempat variabel tersebut, maka keempat variabel tersebut dapat digambarkan dengan empat variabel bebas dan satu variabel terikat diperkirakan sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

